

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TASIKMALAYA

Iwan Setiawan¹

Program Pascasarjana STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

e-mail: setyaone71@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:

Kebijakan Keuangan dan
Pelayanan Publik.

Penelitian ini didasari pengelolaan Keuangan Daerah dan implementasinya dalam pelayanan publik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya belum berjalan secara efektif. Penelitian bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan Keuangan Daerah dan implementasinya dalam pelayanan publik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana penggunaan metode kualitatif bertujuan untuk mengungkap fenomena-fenomena yang terjadi untuk memperoleh jawaban secara mendalam. Sumber data penelitian terdiri dari data hasil observasi dan wawancara melalui informan penelitian yang telah ditentukan peneliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki empat tahap yaitu mengumpulkan informasi, mereduksi data, mendisplay data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan masih terdapat adanya hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sebagai salah satu bentuk pelayanan publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor kemampuan komunikasi dan koordinasi diantara pegawai maupun dengan unit kerja lainnya, disamping kurangnya kemampuan pegawai dalam pengelolaan keuangan sebagaimana ketentuan yang berlaku, serta kurangnya dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai. Sementara sikap yang dimiliki oleh para pegawai cukup baik dalam menunjang keberhasilan organisasi, dengan melaksanakan tugas-tugas pekerjaan sesuai dengan kewenangan dan standard operasional procedure (SOP) yang ada.

ABSTRACT

Key word:

Financial Policy and Public
Services.

This research is based on the management of regional finance and its implementation in public services at the Department of Public Works and Spatial Planning for the City of Tasikmalaya not yet running effectively. The research aims to uncover and analyze the supporting and inhibiting factors in the implementation of Regional Finance policies and their implementation in public services at the Department of Public Works and Spatial Planning in the City of Tasikmalaya. This research method is a qualitative research, where the use of qualitative methods aims to uncover the phenomena that

occur to obtain answers in depth. Sources of research data consisted of data from observations and interviews through research informants who had been determined by the researcher. The data analysis technique used in qualitative analysis has four stages, namely data collection, data reduction, data presentation and the final stage of drawing conclusions and verification. Based on the results of the study, it shows that there are still obstacles in the implementation of financial management as a form of public service at the Tasikmalaya City Public Works and Spatial Planning Office. These factors include the ability to communicate and coordinate among employees and with other work units, in addition to the lack of ability of employees in financial management as stipulated in applicable regulations, and lack of support for adequate work facilities and infrastructure. Meanwhile, the attitude of employees is quite good in supporting the success of the organization, by carrying out work tasks in accordance with the existing authority and standard operating procedures (SOP)

PENDAHULUAN

Pembangunan yang sedang berjalan, khususnya pembangunan daerah berkat otonomi yang sebagian besar diberikan, pelaksanaan pembangunan masih bertumpu pada beberapa alokasi anggaran yang didasarkan pada prinsip keuangan masyarakat. Pembangunan daerah menggunakan beberapa sumber keuangan, diantaranya Dana Alokasi Umum (DAU), dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. Pembangunan setiap daerah yang terjadi saat ini tidak bisa mengandalkan dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga untuk memenuhi berbagai pembangunan yang dibutuhkan oleh daerah diberikan oleh Pemerintah Pusat, hal tersebut sebagai konsekuensi adanya perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pendanaan pemerintah berdasarkan prinsip desentralisasi dilakukan dengan biaya APBD, pendanaan pemerintah untuk pelaksanaan prinsip dekonsentrasi dilakukan dengan biaya APBN, dan pendanaan pemerintah untuk tugas-tugas pembantuan merupakan anggaran pemerintah tingkat penugasan. Pelaksanaan tugas pembangunan didanai oleh pemerintah pusat melalui mekanisme APBN dan dikelola sesuai dengan mekanisme APBD. Siklus pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian proses pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari peraturan APBD, pelaksanaan dan pengelolaan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Prinsip penganggaran yang harus dipatuhi oleh semua pemerintah daerah, yaitu semua pendapatan dalam bentuk uang, serta barang dan / atau jasa, dianggarkan dalam APBD. Semua pendapatan, pengeluaran dan pendanaan dianggarkan secara bruto. Pendapatan total merupakan ukuran dan perkiraan yang dapat dicapai dan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran belanja harus didukung dengan jaminan pendapatan yang baik sebagai dasar hukumnya.

Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam melaksanakan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangannya, telah menerbitkan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 5

Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah, sebagai upaya tertib administrasi penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Bendahara di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kota Tasikmalaya yang telah berusaha memaksimalkan ketentuan dalam penatausahaan keuangannya, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya. Tanggungjawab penatausahaan keuangannya merupakan tugas dari Sub Bagian Keuangan, dan telah melakukan suatu terobosan dengan membuat sistem informasi berbasis Informasi Teknologi yaitu Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan Kota Tasikmalaya (Simpenan Kotak) yang merupakan Implementasi lanjutan dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

Program tersebut di atas merupakan salah satu program dalam rangka meningkatkan kinerja para Pengelola Administrasi di masing-masing Bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya, dimana pada awalnya pengelolaan administrasi dilakukan secara manual, tetapi dengan adanya Simpenan Kotak tersebut, pengelola administrasi di masing-masing bidang menggunakan Sistem Input Data. Melalui sistem tersebut menjadikan para Pengelola Administrasi di masing-masing bidang dapat meminimalisir salah input serta format dapat diseragamkan, dimana sering terjadinya para Pengelola Administrasi di masing-masing Bidang membuat format sesuai dengan keinginan masing-masing.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan yang dibuat baik oleh organisasi private maupun organisasi publik, terutama pemerintah, dalam mencapai tujuannya perlu diimplementasikan dengan baik melalui penggunaan sumber daya yang dimilikinya. Kebijakan dapat mencapai tujuannya apabila dilaksanakan sesuai dengan cara-cara atau langkah-langkah yang telah diatur oleh para pemangku kebijakan. Pencapaian tujuan kebijakan akan ditentukan sejauhmana kebijakan tersebut diimplementasikan oleh para pelaksana kebijakan.

Kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan yang dibuat oleh Pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi publik atau masyarakat untuk dicarikan solusinya dengan menggunakan berbagai sumberdaya yang dimiliki. Kebijakan publik merupakan otoritas pemerintah untuk memberikan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa terhadap masalah-masalah publik, namun demikian pemerintah memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan atas kebijakan yang telah diputusan tersebut karena kebijakan yang dibuat merupakan kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan publik.

Setiap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah harus dapat berpihak kepada masyarakat (Islamy, 2009, hal. 20–21) dengan menjelaskan: “Kebijakan pemerintah harus selalu menjadi kepentingan semua anggota masyarakat. Kebijakan pemerintah adalah sekumpulan tindakan yang ditentukan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang

mempunyai tujuan untuk kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan atau diarahkan pada tujuan tertentu.”

Kebijakan pemerintah harus selalu menguntungkan semua anggota masyarakat, karena kebijakan pemerintah sebagai rangkaian tindakan yang diputuskan dan dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan atau ditujukan untuk tujuan tertentu. Langkah awal dalam pelaksanaan kebijakan (Rusli, 2015, hal. 86) adalah melakukan sosialisasi agar kebijakan yang bersangkutan diketahui, dimengerti dan diterima oleh semua pihak yang bersangkutan. Pada tahap awal pelaksanaan kebijakan ini, pilihan pendekatan yang digunakan sangat menentukan bagaimana sejumlah langkah awal itu dilakukan. Sejak tahap ini diperlukan sebuah konsistensi antara pendekatan yang digunakan dengan strategi yang akan digunakan. Pentingnya pendekatan administrasi melalui sosialisasi yang berkelanjutan dan membantu pelaksanaan kebijakan di semua program atau kegiatan pemerintah agar dapat terlaksana secara tepat dan lancar menuju tujuan kebijakan.

Pelaksanaan atau implementasi kebijakan lebih sulit dibandingkan dengan membuat kebijakan itu sendiri, sebagaimana penjelasan yang dikutip (Rusli, 2015, hal. 21–22) yang menjelaskan bahwa Tak salah jika ada sejumlah pihak yang menyatakan lebih mudah membuat kebijakan daripada menerapkannya. Dalam bahasa lain, lebih sulit mengimplementasikan kebijakan daripada merumuskan dan mendefinisikannya. Tentu saja, ini tentang penerapan kebijakan hingga mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan. Bukan hanya implementasinya tanpa hasil yang jelas dampak dan manfaatnya bagi sasaran kebijakan, yakni masyarakat penerima layanan publik. Implementasi kebijakan yang hanya sampai pada tahap produksi, tanpa hasil dan manfaat yang jelas, merupakan implementasi yang gagal memenuhi tujuan. Pengukuran tersebut tidak hanya sejalan dengan SOP dimana tidak ada penggunaan kekuasaan atau anggaran, tetapi yang jauh lebih penting adalah sejauh mana hasil dan manfaat dari implementasi kebijakan tersebut. Jika merupakan pelayanan publik, maka pertanyaan utama untuk menilai keberhasilannya adalah sejauh mana ia mampu memberikan hasil dan manfaat, yang indikatornya bukan hanya efektivitas dan efisiensi. layanan tetapi juga kepuasan penerima layanan.

Agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik dan mampu mencapai tujuan organisasi, perlu memperhatikan faktor-faktor pelaksanaan kebijakan. Menurut Edwards III (Rusli, 2015, hal. 100) terdapat empat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan atau implementasi kebijakan publik, yaitu:

1. *Communications* (komunikasi)
2. *Resources* (sumber daya)
3. *Dispositions* (disposisi atau sikap pelaksana)
4. *Bureaucratic* (struktur birokrasi)

Secara umum, model implementasi kebijakan di atas memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung dari pendapat para ahli yang membuat model tersebut dan konteks di mana kebijakan tersebut diimplementasikan. Tidak ada satupun model kebijakan yang sangat tepat atau ideal untuk implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan yang maksimal. Pencapaian tujuan kebijakan akan sangat ditentukan oleh beberapa faktor penting lainnya

yang mungkin tidak dapat disampaikan oleh pendapat ahli, sehingga diperlukan beberapa metode, teknik dan kedalaman lapangan yang nyata untuk menjawab tantangan, hambatan dan hambatan dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

METODE

Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana penggunaan metode kualitatif bertujuan untuk mengungkap fenomena-fenomena yang terjadi untuk memperoleh jawaban secara mendalam. Sumber data penelitian terdiri dari data hasil observasi dan wawancara melalui informan penelitian yang telah ditentukan peneliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan tahap terakhir penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi dalam suatu organisasi sangatlah penting dalam mencaai tujuannya, sehingga tanpa adanya komunikasi berbagai pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan dengan baik. Begitu pula dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Guna Lahan Kota Tasikmalaya telah melakukan berbagai upaya dalam menjalin komunikasi dengan seluruh elemen pegawai agar dapat memahami dan melaksanakan arah kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komunikasi dan sosialisasi kebijakan memberikan informasi kepada semua pihak yang terkait dengan program yang akan dilaksanakan, sehingga tidak ada kesalahan dalam memahami informasi yang akan menimbulkan perbedaan persepsi yang akan mengakibatkan perbedaan dalam pelaksanaan kebijakan.

Dengan mengelola komunikasi yang baik, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Guna Lahan Kota Tasikmalaya berupaya menciptakan dan mengembangkan saluran komunikasi yang efektif dan efisien. Semakin baik pengembangan jalur komunikasi yang dibangun maka semakin tinggi pula keberhasilan implementasi kebijakan yang dilakukan dengan baik. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, informasi yang akan disampaikan adalah konsep umum pengelolaan keuangan daerah.

Pegawai pelaksana penatusahaan keuangan daerah bekerja dengan arahan dari Kepala Dinas, selain itu juga melakukan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian Keuangan agar target pengerjaan penatusahaan dan laporan keuangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keampuan dan kahlian pegawai memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan terutama di bagian keuangan. Penatusahaan pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang mutlak harus dilakukan sesuai denga perundang-undangan yang berlaku. Pegawai yang ditugaskan di administrasi keuangan daerah memiliki pelatihan terkait di bidang keuangan namun itu masih terbatas, sehingga mereka cukup lamban dalam mengakses perubahan regulasi, terutama perubahan regulasi pengelolaan keuangan daerah.

Dalam struktur birokrasi pemerintah daerah, staff pegawai merupakan tingkat heirarki dalam jabatan merupakan paling rendah. Oleh karena itu staf pegawai merupakan unsur pelaksanaan di lapangan, dimana tugas pokoknya adalah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai bidangnya masing-masing. Termasuk melaksanakan intruksi atasan sebagaimana tugas pokoknya adalah membantu dalam menyelesaikan tujuan dan sasaran organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan kebijakan Keuangan Daerah dan Implementasinya dalam pelayanan publik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya menunjukkan bahwa faktor komunikasi masih menjadi hambatan, hal tersebut terkait dengan kurangnya komunikasi dan koordinasi diantara para pegawai Dinas PUPR dalam mencaai penatausahaan keuangan di lingkungan dinas yang lebih baik, sehingga masih diperlukan upaya dalam mencapai sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah sesuai kebijakan yang berlaku.

Faktor penghambat selanjutnya yaitu faktor sumber daya, dimana yang paling dominan dalam mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik pada PUPR Kota Tasikmalaya kurangnya pegawai yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan, disamping kurangnya sarana dan prasarana pendukung bagi pegawai dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Kebijakan yang baik tanpa adanya dukungan sumber daya manusia tentu tidak akan mencapai hasil yang diharapkan, serta diperlukan adanya perhatian dari para pemangku kebijakan untuk melengkapi sarana dan prasarana pendukung terhadap kelancaran tugas para pegawai agar lebih efektif dan efisien.

Faktor disposisi atau sikap pelaksana, dalam hal ini para pegawai pada Dinas PUPR Kota Tasikmalaya menunjukkan cukup baik, sehingga telah berusaha keras memberikan hasil yang diharapkan oleh pimpinannya maupun organisasi terkait dengan pengelolaan keuangan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas PUPR Kota Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan SOP yang telah ada dalam membuat laporan keuangannya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dinas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sebagai bentuk pelayanan publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya. Faktor-faktor tersebut antara lain kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi antar karyawan dan dengan unit kerja lainnya, disamping kurangnya kemampuan karyawan dalam pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku, dan kurangnya dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai. Sedangkan sikap pegawai cukup baik dalam mendukung keberhasilan organisasi, dengan melaksanakan tugas kerja sesuai dengan kewenangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Islamy, I. (2009). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Sinar Grafika.

Rusli, B. (2015). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Hakim Publishing.